

# **SKRIPSI**

**PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI,  
KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN  
TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi  
Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan  
Papua)**

**REINHARD RIVALDO RUMAINUM**

**A031191152**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan Papua)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**REINHARD RIVALDO RUMAINUM**

**A031191152**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan Papua)

disusun dan diajukan oleh

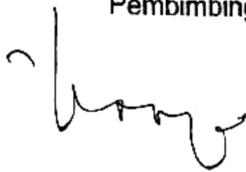
**REINHARD RIVALDO RUMAINUM**

**A031191152**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 24 Agustus 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19650305 199203 2 001

Pembimbing II



Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA.  
NIP 19590818 198702 2 002



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan Papua)

disusun dan diajukan oleh

**REINHARD RIVALDO RUMAINUM**

**A031191152**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 24 Agustus 2023 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Ketua	.....
2	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA.	Sekretaris	.....
3	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	.....
4	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	.....



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Reinhard Rivaldo Romainum

NIM : A031191152

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, ETIKA PROFESI, KOMITMEN ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan Papua)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Reinhard Rivaldo Romainum

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata I Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti sadar dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, besar harapan peneliti agar kiranya saran dan masukan yang bersifat membangun dan positif terhadap skripsi ini guna menunjang manfaat yang diharapkan dalam skripsi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak menerima dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati melalui kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Alm. Rini Rabiawati dan Bapak Frans Romainum yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, serta ucapan istimewa bagi saudari peneliti; Kak Ge, Kak Frasca, dan Kak Laura yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis.
2. Dosen pembimbing I, ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan dosen pembimbing II, ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si, CA. yang telah memberikan bantuan baik waktu, saran dan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberikan

kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.

3. Dosen penguji I bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA dan dosen penguji II bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, banyak ilmu dan masukan dari beliau ketika menguji skripsi peneliti sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala niat baik yang dikerjakan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan berharga selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta Departemen Akuntansi yang banyak membantu serta memberikan pelayanan terbaik selama masa perkuliahan peneliti.
6. Teman-teman Domino (Chandra, Bang Dhik, Rara, Jojoijoy, Cinra, Navis, Oja, Kiki, Rian, Valdi, dan Gofaldi) serta Ikki and *Friends* (Rifqi Surahmen, Aqil Wowits, dan Fahrhan Wibu) atas kebersamaan, dukungan, wadah berbagi keluh kesal dan kesempatan belajar bersama serta kesempatan untuk berdiskusi banyak hal sejak masa SMA dan masa kepengurusan penulis di lembaga mahasiswa hingga saat ini.
7. Kabinet IMA Bahagia Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Periode 2022 atas dukungan selama mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai Anggota Pengaderan selama satu periode kepengurusan.
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (IMA FEB-UH) yang telah menjadi wadah belajar bersama sejak masa pengaderan hingga saat ini.

9. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PMKO FEB-UH) yang telah menjadi wadah melayani dan tumbuh bersama dalam iman hingga saat ini.
10. Teman-teman Akuntansi 2019 “19NITE” dan rekan-rekan asisten dosen yang telah menemani dan berbagi canda tawa bersama selama masa perkuliahan hingga berakhirnya masa studi peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh rasa syukur, peneliti mendoakan semoga selalu terjaga dalam kebaikan, segala kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas lebih lagi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dimudahkan setiap hal baik yang diupayakan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik itu dalam menunjang keilmuan maupun sebagai bahan pertimbangan pihak yang membutuhkan. Sekian, terima kasih.

Makassar, 18 Juli 2023

Peneliti

## ABSTRAK

### **Pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada Auditor Pemerintah di BPK Perwakilan Papua)**

#### ***The Effect of Auditor Independence, Professional Ethics, Organizational Commitment, and Leadership Style on Performance of Government Auditor (The Empirical Study on the Representative Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia in Papua Province)***

Reinhard Rivaldo Romainum  
Kartini  
Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah independensi, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah BPK RI Perwakilan Provinsi Papua secara parsial. Penelitian ini menggunakan desain studi korelasional dengan instrumen kuesioner sebagai alat untuk mengukur variabel. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 49 responden yang telah melengkapi seluruh pernyataan dalam kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dari keempat variabel yang memengaruhi kinerja auditor BPK RI Provinsi Papua, variabel independensi, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif.

**Kata Kunci:** Independensi Auditor, Etika Profesi, Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Auditor.Pemerintah.

*This study aims to determine whether the independence, professional ethics, organizational commitment, and leadership style affect performance of government auditor of Representative Supreme Audit Board of Republic of Indonesia in Papua province partially. This study used a correlational study design with a questionnaire instrument as a tool for measuring variables. The method of analysis was used to test the hypothesis is multiple linear regression, where analysis is based on data from 49 respondents who have completed all the statements and questionnaires. The results of this study indicate that independence, professional ethics, organizational commitment, and leadership style partially affect performance of government auditor of Supreme Audit Board of Republic of Indonesia in Papua province. Among the four variables that affect BPK RI auditors Papua Province, independence, professional ethics, organizational commitment, and leadership style have a positive effect.*

**Keywords:** Auditor Independence, Professional Ethics, Organizational Commitment, Leadership Style, Performance of Government Auditor.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Teori Penetapan Tujuan .....	13
2.2 Teori Atribusi .....	14
2.3 <i>Auditing</i> .....	15
2.4 Kinerja Auditor .....	16
2.5 Independensi .....	17
2.6 Etika Profesi .....	17
2.7 Komitmen Organisasi .....	18
2.8 Gaya Kepemimpinan .....	19
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	20
2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	21
2.11 Hipotesis Penelitian .....	23
2.11.1 Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor ...	23
2.11.2 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor .....	24
2.11.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor .....	24
2.11.4 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
3.1 Rancangan Penelitian .....	26
3.2 Tempat dan Waktu .....	26
3.3 Populasi dan Sampel .....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	30

3.6.1 Variabel Penelitian .....	30
3.6.2 Definisi Operasional .....	30
3.7 Instrumen Penelitian .....	34
3.8 Analisis Data .....	34
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	35
3.8.2 Uji Kualitas Data .....	35
3.8.3 Uji Asumsi Klasik .....	36
3.8.4 Uji Hipotesis.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Deskripsi Data.....	40
4.2 Analisis Deskriptif Responden.....	41
4.2.1 Jenis Kelamin Responden .....	42
4.2.2 Pengalaman Kerja Responden .....	42
4.2.3 Pendidikan Responden.....	43
4.2.4 Jabatan Responden.....	43
4.3 Hasil Penelitian .....	44
4.3.1 Uji Kualitas Data .....	44
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	47
4.3.3 Uji Hipotesis.....	52
4.4 Pembahasan Hipotesis .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	20
3.1 Indikator dan Sumber Penelitian .....	33
4.1 Statistik Deskriptif .....	41
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	42
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja .....	42
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	43
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	43
4.6 Hasil Uji Validitas .....	45
4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	47
4.8 Hasil Uji Normalitas .....	48
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	49
4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	51
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	53
4.12 Hasil Uji Statistik t .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
4.1 Grafik <i>Scatterplot</i> .....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Peneliti .....	70
2 Kuesioner Penelitian .....	72
3 Hasil Uji SPSS V.26.....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kinerja didefinisikan sebagai hasil dari upaya individu, yang dicapai menggunakan keterampilan dan perilaku dalam keadaan tertentu (Huseno, 2016:86). Kinerja adalah pekerjaan yang diselesaikan seorang pegawai selama menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kinerja adalah ukuran seberapa berhasil (atau tidak berhasil) suatu entitas telah menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya. Maksud atau tujuan organisasi pemerintah dituangkan dalam kinerjanya serta visi, misi, dan lembaga strategisnya, yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Goldwasser (1993) dalam *Journal of CPA*, kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu.

Guna menjawab tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah perlu mewujudkan kinerja audit yang baik, demi terciptanya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab agar konsep pemerintahan *good governance* dapat diwujudkan. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.” Sesuai dengan pasal di atas, dapat dipahami bahwa APBN wajib dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, pada pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa: “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.” Maka, pengelolaan keuangan negara hendaklah dilaksanakan sesuai kaidah hukum yang diatur dengan undang-undang.

Berdasar asas hirarki perundang-undangan, pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 perlu dijabarkan dalam undang-undang tentang keuangan negara. Kaidah pokok hukum tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas *good governance* dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Seiring perubahan zaman, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengembangkan asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara, sebagai refleksi penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, asas profesionalitas, asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Anggara, 2016:29).

Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil menghendaki agar setiap kegiatan dan output kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Asas proporsionalitas mengharuskan agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Asas profesionalitas menekankan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas keterbukaan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan egaliter tentang pengelolaan keuangan negara dengan menimbang perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas

dan mandiri memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara independen (Suroso, 2014).

Asas-asas tersebut sebagai acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, demi terciptanya transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan mendorong profesionalitas guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara (Enas *et al.*, 2021).

Berdasarkan amanat pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.", maka diperlukan adanya lembaga audit yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Lembaga audit di Indonesia yang diamanatkan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan negara adalah lembaga audit internal pemerintah (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP, serta Inspektorat) dan lembaga audit eksternal di luar pemerintah itu sendiri (Badan Pemeriksa Keuangan, disingkat BPK).

Dilihat dari tujuannya, Lembaga audit internal bertugas mengaudit pengendalian internal di lingkungan organisasi yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa publik (*public goods and services*) yang bekerja untuk kepentingan manajemen organisasi/lembaga pemerintahan dan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), yang biasa disebut Inspektorat Daerah (Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007). Lembaga audit internal bertujuan membantu manajemen (dalam hal ini Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota) untuk menjamin terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengendalian internal pemerintahan. Pemakai opini yang dikeluarkan adalah

manajemen pemerintah. Sedangkan lembaga audit eksternal bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang pemakai opininya adalah DPR dan rakyat.

Menurut Nainggolan dan Prabowo (2019), independensi auditor internal masih rentan terhadap intervensi pemerintah. Hal ini menjadi indikasi dari tidak berpengaruh signifikannya independensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal, sebab ketaatan auditor terhadap kebijakan dari pejabat pemerintah. Dalam hal ini, auditor internal bekerja untuk manajemen atau organisasi yang sama dengan objek yang diaudit (*auditee*), sehingga independensi auditor internal biasa dipertanyakan. Berbeda dengan auditor internal, auditor eksternal (dalam hal ini BPK) bersifat bebas dan mandiri (diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E Ayat 1), di mana BPK berada di luar objek yang diaudit. Kedudukan BPK yang tidak dibawah oleh lembaga tinggi negara pemangku kebijakan (misal Presiden, Gubernur atau Walikota/Bupati) membuat peluang intervensinya amat kecil.

BPK bertugas dalam lingkup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terkait keuangan negara, mencakup seluruh aspek keuangan negara sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara. Secara garis besar, BPK berwenang melaksanakan tiga jenis pemeriksaan oleh Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, antara lain; (1) Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam rangka memberikan pernyataan atau opini terkait tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan dilaksanakan setelah laporan keuangan diserahkan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran laporan keuangan berakhir. (2) Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, serta aspek efektivitas dari kinerja pemerintah

dalam mengelola keuangan negara, yang dilakukan demi kepentingan manajemen, dan (3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. (Tuanakotta, 2016:705).

Menurut Tuanakotta (2016:705), BPK mempunyai kebebasan pada ketiga tahap pemeriksaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil pemeriksaan. Pada tahap perencanaan, kebebasan yang dimiliki BPK mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa (kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang atau pemeriksaan yang diminta khusus oleh lembaga perwakilan). Dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, BPK juga memiliki kebebasan dalam aspek ketersediaan anggaran, penggunaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang diperlukan. Selain itu, BPK berhak memakai hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), di mana BPKP atau Inspektorat wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK.

Hasil pemeriksaan oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena perannya yang vital, BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu mengetahui kinerja auditornya, demi tercapainya tujuan BPK yang diamanatkan undang-undang dan realisasi kinerja BPK dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti mempersepsikan variabel independensi auditor, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan dalam penelitian sebagai variabel

independen untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa baik kinerja auditor pemerintah.

Kode etik akuntan indonesia (IAI, 2021:Seksi 400) menyatakan bahwa mempertahankan independensi dalam menunaikan tugasnya merupakan tuntutan dalam menjadi seorang auditor. Independensi yang dimaksud adalah sikap berhati-hati terhadap pengaruh berbagai pihak, sehingga auditor tidak dikendalikan dan tidak bergantung kepada pihak lain. Kode etik ini sejalan dengan kode etik BPK (Pasal 1 Peraturan BPK No. 4 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa independensi adalah nilai BPK yang tercermin dalam sikap dan tindakan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, dengan tidak berpihak kepada siapapun dan tidak dikendalikan oleh siapapun.

Auditor tidak boleh dikendalikan ataupun dipengaruhi oleh pihak lain, meskipun kedudukan pihak lain tersebut lebih tinggi dari auditor dan mampu memberi tekanan kepada auditor. Untuk menjadi independen, auditor harus memunyai sikap jujur tidak hanya kepada pihak yang diaudit, tetapi juga terhadap pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan (Nasution *et al.*, 2019:63).

Kinerja auditor juga dapat dipengaruhi oleh etika profesi. Menurut Ariyanto *et al.* (2010) setiap disiplin ilmu (termasuk profesi auditor) membutuhkan etika profesi untuk meraih kepercayaan publik. Setiap auditor wajib menjunjung tinggi etika profesinya agar tidak melanggar hukum dalam memeriksa laporan keuangan kliennya. Auditor harus menjunjung standar etika profesi dalam setiap tindakannya untuk meningkatkan kinerja auditor tersebut. Kebutuhan untuk menegakkan standar etika berkaitan dengan tuntutan publik akan kinerja auditor, dikarenakan vitalnya peran profesi auditor. Dalam rangka meningkatkan kinerjanya dan meraih kepercayaan publik, seorang auditor yang mampu menjunjung tinggi etika profesi

akan bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku dan prinsip-prinsip etika yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya, kinerja auditor juga dipengaruhi oleh seberapa baik komitmen organisasinya. Sikap seseorang terhadap organisasi tempatnya bekerja disebut sebagai komitmen organisasi. Sikap ini terkait dengan bagaimana orang memandang tujuan organisasi dan seberapa terlibatnya mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Penelitian Wulandari dan Suputra (2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan kinerja auditor saling berhubungan. Auditor dengan komitmen tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja cenderung memiliki rasa kepemilikan organisasinya. Agar termotivasi untuk bekerja keras dan memberikan hasil pemeriksaan audit yang berkualitas, seorang auditor perlu memiliki rasa pengabdian dan loyalitas yang kuat terhadap organisasinya. Auditor akan puas dengan pekerjaan mereka dan berusaha untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka untuk organisasi mereka, yang akan meningkatkan kinerja auditor tersebut.

Kinerja auditor pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya sedemikian rupa, agar orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Febrianty *et al.*, 2020: 48). Semakin berkomitmennya bawahan terhadap organisasinya (di mana bawahan memiliki motivasi kerja yang tinggi) menandakan seorang pemimpin semakin mahir dalam mengatur dan mempengaruhi bawahannya, sehingga kinerja bawahannya menjadi lebih baik.

Meskipun auditor memiliki kode etik yang harus ditaati dalam menjalankan tugasnya, realitanya auditor kerap berhadapan dengan keadaan dilematis ketika melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pada Provinsi Papua, Mahfud MD

mengungkapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua mengalami kesulitan selama memeriksa keuangan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi dana PON 2021 dan alokasi anggaran untuk pimpinan Pemerintah Provinsi Papua. Karena mengalami kesulitan, BPK dalam kasus ini memeriksa kasus ini dari hasil temuan seadanya saja, sehingga BPK lebih banyak menetapkan *disclaimer* atas kasus keuangan di Papua tersebut (Silvia, 2022). Tak heran bila Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur, mencapai prestasi dengan predikat Opini WTP sebanyak 8 kali sejak tahun 2015 lalu (Pemerintah Provinsi Papua, 2022).

Di wilayah Indonesia lainnya, pada Provinsi Papua Barat, investigasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat terkait kasus korupsi pengadaan ATK di BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017 mengalami pengendapan selama satu tahun tiga bulan (Tim Redaksi Jagat Papua, 2022). Fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja auditor yang kurang memuaskan dalam melakukan pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan keuangan negara kurang dapat diandalkan oleh publik. Hal ini melatarbelakangi penelitian ini, untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja auditor.

Dalam penelitian Wahyu *et al.* (2022) yang menyelidiki pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, pemahaman *good governance*, profesionalisme, dan independensi terhadap kinerja auditor BPK membuktikan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, namun penelitian Fachruddin (2019) menunjukkan bahwa variabel independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor serta penelitian Monique & Nasution (2020) menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa masih ada inkonsistensi pada variabel independensi dan gaya kepemimpinan sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam penelitian Aday *et al.* (2020) yang menyelidiki pengaruh etika profesi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor BPK membuktikan bahwa variabel etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, namun penelitian Rahmat *et al.* (2022) menunjukkan bahwa variabel etika profesi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Dari kedua penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa masih ada inkonsistensi pada variabel etika profesi sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian Faiz & Andayani (2022) terkait topik ini menjelaskan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Hal ini didukung oleh pengaruh independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah. Hariyanti & Mustikawati (2019) menunjukkan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kinerja auditor. Dari kedua penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa masih ada inkonsistensi pada variabel komitmen organisasi sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pada penelitian yang dilakukan Monique & Nasution (2020) terhadap auditor pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Bali, peneliti tidak menguji pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Pada penelitian Gustia (2014) terhadap auditor pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, peneliti telah menguji pengaruh variabel independensi, etika profesi, gaya kepemimpinan, serta gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Namun belum ada yang menguji pengaruh keempat variabel tersebut terhadap kinerja auditor

pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi Papua. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk membuktikan apakah hasil penelitian akan sama atau berbeda jika dilakukan pada auditor BPK Perwakilan Provinsi lain, yakni auditor BPK Perwakilan Provinsi Papua. berdasarkan penjabaran masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Independensi, Etika Profesi, Komitmen Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris pada Auditor Pemerintah di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor eksternal di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah di BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Bagian kegunaan penelitian akan menunjukkan kegunaan dari penelitian dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hubungannya dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh independensi, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan masukan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengevaluasi independensi, etika profesi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor BPK.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan variabel yang diteliti, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: Bab ini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Penetapan Tujuan**

Tujuan adalah objek atau juga dapat diartikan sebagai sasaran dari suatu tindakan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu (Locke & Latham, 2002). Teori penetapan tujuan merupakan teori yang dikembangkan oleh Locke dan Latham pada tahun 1978. Teori ini menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik dan sulit untuk dicapai mengarahkan seseorang pada tingkat kinerja tugas yang lebih tinggi daripada tujuan yang mudah atau tujuan abstrak yang tidak jelas (Locke & Latham, 2002). Ada hubungan linier yang bersifat positif antara tingkat kesulitan mencapai target serta kinerja tugas. Karena tujuan mengacu pada hasil yang bernilai di masa depan, olehnya penetapan tujuan adalah yang pertama dan terpenting (Locke & Latham, 2006).

Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa selama seseorang berkomitmen pada tujuan, maka seseorang tersebut akan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Locke & Latham, 2002). Penetapan tujuan berguna dalam membentuk suatu kepuasan diri dengan hasil kinerja yang dilakukan seseorang. Tujuan yang tinggi akan lebih memotivasi seseorang karena tujuan tersebut membutuhkan suatu usaha yang lebih banyak dan apabila tujuan tersebut tercapai akan meningkatkan perasaan percaya diri seseorang karena telah diakui di lingkungan kerjanya bahwa individu tersebut berhasil mencapai suatu tujuan yang tidak semua orang bisa mencapainya.

Teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa auditor perlu memahami tujuan serta apa yang diharapkan akan terjadi sebagai akibat dari hasil usahanya dalam bekerja. Ketika auditor dapat memahami tujuan, auditor diminta untuk tetap berada di jalur dan berkonsentrasi pada tujuan awal. Tujuan ini dapat menginspirasi auditor dan meningkatkan kinerja mereka jika dipahami. Dengan pemahaman tersebut, auditor akan tetap bertindak secara profesional, termasuk menjaga sikap independen dan tetap memperhatikan kepeduliannya terhadap organisasi dalam kondisi apapun.

## **2.2 Teori Atribusi**

Pada tahun 1958, Fritz Heider mengembangkan pertama kali teori atribusi. Menurut pandangan ini, perilaku seseorang dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal (Heider, 2013). Karakteristik internal sering disebut sebagai faktor intrinsik (atribusi disposisional) yang mempengaruhi bagaimana orang berperilaku dapat diubah oleh orang yang bersangkutan. Contohnya termasuk ciri-ciri kepribadian, persepsi seseorang tentang diri sendiri, bakat, dan motivasi. Sedangkan variabel eksternal, juga dikenal sebagai faktor situasional atau atribusi situasional, dianggap sebagai hasil dari kekuatan eksternal yang memaksa orang untuk bertindak dengan cara tertentu, seperti keadaan sosial, norma sosial, dan penilaian sosial.

Pada penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan terkait kinerja auditor dalam perikatan auditnya. Memaksimalkan kinerja auditor dalam melaksanakan auditnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor (atribusi) internal berupa independensi, etika profesi dan komitmen organisasi dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gaya kepemimpinan,

### **2.3 Auditing**

Audit adalah proses memperoleh dan menganalisis bukti atau menganalisis mengenai Informasi untuk memastikan dan mengkomunikasikan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (Arens, 2012: 4). Audit atas laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh entitas privat namun entitas publik pun perlu melakukan audit atas laporan keuangannya. Sektor publik perlu diaudit laporan keuangannya guna menciptakan akuntabilitas penggunaan anggaran yang dilakukan suatu sektor publik dalam satu periode (Nurwanto *et al.*, 2010).

Sektor publik erat kaitannya dengan masyarakat suatu wilayah olehnya laporan keuangan yang disusun suatu entitas sektor publik harus diaudit untuk meningkatkan tingkat kepercayaan laporan keuangan yang disusun entitas publik. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas publik dapat memberikan informasi berupa (Nurwanto *et al.*, 2010):

1. Penggunaan sumber daya publik secara efektif sambil mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan program pemerintah yang memenuhi tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
3. Memberikan pelayanan publik dengan cara yang efektif, efisien, dan terjangkau.

Audit eksternal untuk sektor publik di Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini sesuai dengan ayat 5 Pasal 23 UUD 1945, BPK bertugas memeriksa bagaimana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lainnya. Lembaga atau badan

yang mengelola keuangan negara mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

#### **2.4 Kinerja Auditor**

Prestasi kerja, juga dikenal sebagai kinerja, adalah hasil dari upaya individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya berdasarkan bakat, pengalaman, kesungguhan, dan ketersediaannya (Hasibuan & Hasibuan, 2016). Kinerja auditor adalah ekspresi potensi kerja auditor berupa perilaku kerja auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai hasil maksimal, yang diukur menggunakan faktor objektif dan faktor subjektif.

Ketika seorang auditor ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja yang sebaik mungkin, maka kinerjanya merupakan perwujudan dari potensi kerjanya dan dapat dinilai berdasarkan unsur subjektif dan objektif (hasil kerja dan disiplin kerja) (inisiatif, kerjasama dan kesetiaan) (Esya, 2008). Kinerja pada hakekatnya adalah definisi umum tentang seberapa baik suatu kegiatan dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan, sasaran, misi, dan visi bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya (Rahmadayanti & Wibowo, 2017). Kinerja dapat diartikan sebagai alat ukur atau penilaian yang berkaitan dengan hasil yang ditunjukkan oleh target awal yang telah ditetapkan secara sah tanpa melanggar hukum, etika, dan konvensi yang berlaku.

## 2.5 Independensi

Independensi dapat dipahami sebagai sikap seseorang yang memiliki sudut pandang objektif (Arens, 2008: 87). Auditor harus independen baik fakta maupun penampilan. Ketika auditor benar-benar mampu melakukan audit dengan objektivitas, maka terdapat independensi. Independensi akan muncul ketika auditor objektif dalam bekerja.

Pada kenyataannya, menjaga sikap independen adalah sesuatu yang sering dipertahankan oleh auditor. Berikut ini adalah beberapa situasi yang sering mempengaruhi sikap independensi auditor (Mulyadi, 2002: 39):

1. Auditor dikompensasi atas jasanya oleh kliennya sebagai auditor yang tidak memihak.
2. Auditor seringkali memiliki kecenderungan untuk menuruti permintaan kliennya sebagai penyedia jasa.
3. Lompatan dalam kinerja klien dapat dihasilkan dari terus memperkuat kemampuan mental seseorang.

Pertumbuhan profesi akuntan publik sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap independensi dan standar etika auditor independen. Independensi auditor bergantung pada integritas intelektual auditor. Seorang auditor tidak boleh memiliki tanggung jawab kontraktual kepada kliennya dan tidak memiliki kepentingan finansial pada klien agar dianggap oleh orang lain sebagai individu yang independen.

## 2.6 Etika Profesi

Etika mengkaji terkait bagaimana seorang individu harus memperlakukan satu sama lain (Futri & Juliarsa, 2014). Kode Etik yang telah ditetapkan harus dipatuhi oleh auditor. Proses audit yang mengacu pada Standar Audit dan Kode

Etik harus diikuti (Arfan & Ishak, 2009). Berikut prinsip dasar kode etik BPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016:

1. Tidak adanya konflik kepentingan antara pemeriksa dan teruji dalam kaitannya dengan tanggung jawab audit dikenal sebagai independensi.
2. Integritas mensyaratkan dapat dipercaya, berani, cerdas, dan akuntabel ketika melakukan audit. Auditor harus menyadari nilai-nilai menjunjung tinggi integritas dan melayani kepentingan publik dalam menjalankan tugas profesionalnya.
3. Seorang auditor harus memiliki pola pikir untuk melayani kepentingan publik, menghormati dan menjaga kepercayaan publik, serta mempertahankan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme diartikan sebagai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesional untuk melakukannya.

## **2.7 Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi adalah perilaku di mana karyawan menunjukkan kesetiaan mereka kepada perusahaan dengan berpegang teguh pada itu, mencapai tujuannya, dan tidak memiliki keinginan untuk berhenti dalam bentuk apa pun (Yusuf & Syarif, 2018). Menurut Meyer *et al.*, (1993) terdapat komponen-komponen komitmen organisasi, yaitu:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*). Komponen ini berkaitan dengan keterkaitan emosional seseorang dengan organisasinya serta keterlibatan seseorang dengan organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen efektif akan setia bekerja dengan organisasinya karena mereka menginginkan tersebut dan telah terikat secara emosional.

2. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*). Komitmen ini berkaitan dengan sudut pandang atau persepsi seseorang terkait biaya dan risiko yang dia peroleh bilamana ia meninggalkan organisasinya. Komitmen ini memperhitungkan untung dan rugi bila seseorang meninggalkan organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh melakukan hal itu dan tidak ada pilihan lain.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*). Komitmen ini terkait dengan dimensi moral, di mana didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi tempat ia bekerja. Seseorang yang memiliki komitmen normatif merasa bahwa mereka wajib untuk bertahan dalam organisasi.

## 2.8 Gaya Kepemimpinan

Sebanding dengan tindakan pemimpin adalah gaya linguistik. Ini adalah sarana yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya (Khan *et al.*, 2015). Setiap pemimpin memiliki gayanya masing-masing, dan ada banyak cara untuk memimpin. Gaya otoriter, birokratis, *laissez-faire*, dan kepemimpinan adalah beberapa yang paling umum (Park, 1996).

Definisi perspektif kepemimpinan dan manajemen profesional terhadapnya telah mengalami revolusi selama beberapa dekade terakhir. Dari gaya diktator yang sangat tradisional, mereka telah berubah menjadi pendekatan yang benar-benar kreatif dan partisipatif. Pada titik tertentu diputuskan bahwa tidak semua yang baru itu baik dan tidak semua yang lama itu buruk. Sebaliknya, berbagai pendekatan diperlukan untuk berbagai keadaan, dan setiap pemimpin harus mengetahui waktu yang tepat untuk menggunakannya masing-masing.

## 2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut tabel penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Faiz & Andayani (2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independensi</li> <li>2. Komitmen organisasi</li> <li>3. Gaya kepemimpinan</li> <li>4. Pemahaman <i>good governance</i></li> </ol>	Variabel independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pemahaman <i>good governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah.
2.	Wahyu <i>et al.</i> , (2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaya kepemimpinan</li> <li>2. Budaya organisasi</li> <li>3. Pemahaman <i>good governance</i></li> <li>4. Profesionalisme</li> <li>5. Independensi</li> </ol>	Variabel gaya kepemimpinan, budaya organisasi, pemahaman <i>good governance</i> , profesionalisme, dan independensi, berpengaruh positif terhadap kinerja auditor BPK perwakilan Provinsi Bali
3.	Rahmat <i>et al.</i> , (2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika profesi</li> <li>2. Profesionalisme</li> <li>3. Gaya kepemimpinan</li> </ol>	Variabel profesionalisme, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah sedangkan variabel etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
4.	Zulfi <i>et al.</i> , (2022)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika auditor</li> <li>2. Pengalaman kerja auditor</li> <li>3. Independensi</li> </ol>	Variabel etika auditor dan independensi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor BPK perwakilan Sumatera Barat, sedangkan variabel pengalaman kerja auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor BPK Perwakilan Sumatera Barat.

5.	Rahayuni (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Locus of control</i></li> <li>2. Komitmen organisasi</li> </ol>	Variabel <i>locus of control</i> dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah.
6.	Prima dan Monique (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme</li> <li>2. Independensi Auditor</li> <li>3. Etika Profesi</li> <li>4. Gaya Kepemimpinan</li> </ol>	Variabel profesionalisme, independensi auditor dan etika profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor
7.	Anita (2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independensi,</li> <li>2. Komitmen organisasi</li> <li>3. Gaya kepemimpinan</li> <li>4. Pemahaman <i>good governance</i></li> </ol>	Variabel independensi dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah, sedangkan gaya kepemimpinan dan pemahaman <i>good governance</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.
8.	Prima dan Monique (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesionalisme</li> <li>2. Independensi Auditor</li> <li>3. Etika Profesi</li> <li>4. Gaya Kepemimpinan</li> </ol>	Variabel profesionalisme, independensi auditor dan etika profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2023

## 2.10 Kerangka Pemikiran Penelitian

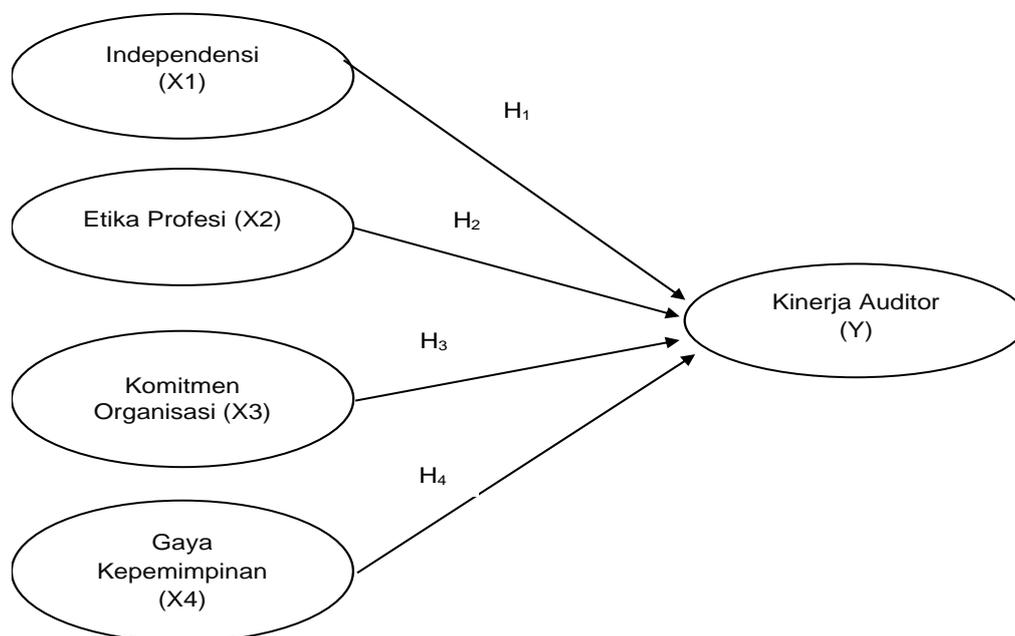
Kinerja seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori atribusi yang membagi determinan perilaku seseorang menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja auditor BPK adalah gaya kepemimpinan terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam lingkungan organisasi tempat auditor bekerja, gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja

auditor. Semakin baik model gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan meningkatkan kinerja auditor karena auditor merasa tidak terbebani terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan.

Adapun faktor internal dalam kinerja auditor adalah etika profesi, independensi, dan komitmen organisasi. Auditor yang memiliki etika profesi yang baik akan menjunjung tinggi etika dalam pelaksanaan auditnya. Independensi merupakan bagian dari etika profesi yang perlu dimiliki auditor, seorang auditor yang memiliki independensi dalam melakukan tugasnya maka auditor tersebut akan memiliki kinerja yang baik karena tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam melakukan audit. Komitmen organisasi terkait dengan bagaimana peranan dan tanggung jawab auditor BPK terhadap organisasi tempatnya bekerja. Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi auditor akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan kemampuannya untuk organisasi tempatnya bekerja sehingga kinerja auditor juga akan meningkat.

Teori penetapan tujuan dapat menjelaskan mengenai kinerja auditor untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang ditempatinya. Auditor perlu memahami tujuan serta apa yang diharapkannya akan terjadi sebagai akibat dari hasil usahanya dalam bekerja. Ketika auditor dapat memahami tujuan, auditor diminta untuk tetap berada di jalur dan berkonsentrasi pada tujuan awal. Tujuan ini dapat menginspirasi auditor dan meningkatkan kinerja mereka jika dipahami. Dengan pemahaman tersebut, auditor akan tetap bertindak secara profesional, termasuk menjaga sikap independen dan tetap memperhatikan kepeduliannya terhadap organisasi dalam kondisi apapun.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, kerangka konseptual penelitian ini adalah:

**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

*Sumber: diolah peneliti, 2023*

## 2.11 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

### 2.11.1 Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor

Independensi mengacu pada keadaan pikiran yang tidak terpengaruh oleh faktor luar dan kejujuran pihak auditor untuk mengomunikasikan niat saat menghasilkan dan menyajikan pendapat (Faiz & Andayani, 2022). Akuntan publik tidak hanya perlu menjunjung tinggi atau mempertahankan sikap mental independen dalam menjalankan tugas profesionalnya; kepercayaan mereka yang memanfaatkan laporan keuangan dalam independensi akuntan publik juga penting (Futri & Juliarsa, 2014). Karena auditor tidak akan terpengaruh oleh kliennya jika ia benar-benar independen, maka independensi merupakan unsur penentu dalam kualitas audit. Kualitas audit yang baik juga mengimplikasikan bahwa auditor telah bekerja dengan baik (Zulfi *et al.*, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Perwito (2022), Rahman *et al.* (2020), dan Faturachman (2019) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis berupa:

**H<sub>1</sub>: Independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.**

#### 2.11.2 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor

Auditor yang menjunjung tinggi etika profesi akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pula (Zagoto & Hayati, 2020). Untuk memperoleh kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor, perlu dijunjung tinggi adanya kode etik. Auditor harus menjunjung tinggi standar moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencegah penipuan atau kecurangan. Kinerja seorang auditor juga akan berkualitas jika memiliki etika yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatiara (2019), Hayati *et al.* (2019), dan Zagoto & Hayati (2020) menunjukkan hasil bahwa etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis berupa:

**H<sub>2</sub>: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.**

#### 2.11.3 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor

Dedikasi untuk mencapai level tertinggi dalam suatu bidang pekerjaan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kinerja seseorang dalam industri tersebut (Kiabel, 2012). Seorang auditor perlu memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasinya (BPK). Komitmen ini akan meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan auditnya. Sebagai akibat dari tuntutan kewajiban lain, komitmen dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik atau, di sisi lain, memaksa mereka

untuk berhenti. Dedikasi yang benar akan memberi staf pekerjaan sebanyak mungkin (Yusuf & Syarif, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Faiz & Andayani (2022), Rahayuni (2020), dan Wiguna & Lisda (2019) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis berupa:

**H<sub>3</sub>: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.**

#### 2.11.4 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor

Gaya kepemimpinan terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam lingkungan organisasi tempat auditor bekerja, gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja auditor (Khan *et al.*, 2015). Semakin baik model gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi Badan Pemeriksa Keuangan akan meningkatkan kinerja auditor karena auditor merasa tidak terbebani terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhanty & Farah (2020), Larasati (2019), dan Rahmat *et al.* (2022) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan hipotesis berupa:

**H<sub>4</sub>: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.**